

# Media Sosial dan Prospek Muslim Kosmopolitan: Konstruksi & Peran Masyarakat Siber pada Aksi Bela Islam

Iswandi Syahputra<sup>1</sup>  
iswandi.syahputra@uin-suka.ac.id

**Abstract:** This article discusses Indonesian cyber society activities and its configuration on social media which considered being able to encourage social movements, for instance Defending Islam Action, subsequently well known as 'Defending Islam Action 212'. This article argues that netizens' activities on social media turned out to involve various class variants and social status and are able to encourage the 'Defending Islam Action'. Moreover, the social formation and activities of netizens on the social media constitute the prospects for the social construction of the cosmopolitan Muslim community in Indonesia. The portrait of Indonesian cosmopolitan Muslim is seen as a congregation of citizens compelled by their religious awareness, regardless of social, political, economic boundaries and even inter-religiosity which reveres universal principles of humanity.

**Abstrak:** Artikel ini mendiskusikan aktivitas dan konstruksi masyarakat siber di media sosial, yang memiliki kekuatan subtil dalam menstimulasi gerakan sosial, seperti Aksi Bela Islam, yang lebih lanjut dikenal dengan Aksi Bela Islam 212. Artikel ini berargumentasi bahwa aktivitas netizen di media sosial ternyata melibatkan berbagai varian kelas dan status sosial dan mampu mendorong gerakan 'Aksi Bela Islam'. Lebih dari itu formasi dan aktivitas netizen tersebut merupakan prospek konstruksi sosial masyarakat Muslim kosmopolitan di Indonesia. Potret Muslim kosmopolitan Indonesia dimaksud adalah gambaran berkumpulnya warga negara karena didorong oleh kesadaran religius mereka tanpa sekat sosial, politik, ekonomi bahkan lintas religiusitas yang menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan universal.

**Kata Kunci:** Media sosial, gerakan sosial, aksi bela Islam, muslim kosmopolitan

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Pendahuluan

Media sosial merupakan istilah umum yang dipakai untuk berinteraksi dengan sesama manusia mencakup berbagai *platform online* dengan beragam atribut, format komunikasi, dan fungsi sosiabilitas. Kaplan dan Haenlein (2010, hlm. 61) memberi pemahaman tentang media sosial sebagai “*a group internet based applications that build on the ideological and technological foundations of web 2.0, and that allow the creation and exchange of user generated content*”. Media sosial menjadi begitu unik karena memiliki sejumlah karakter, sehingga dapat memberi pengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan di dunia real, termasuk memberi stimulasi gerakan sosial.

Mayfield (2008) mengidentifikasi lima karakteristik spesifik yang menggarisbawahi operasi semua media sosial. Karakter spesifik itu adalah adanya partisipasi dari khalayak, bersifat terbuka, adanya percakapan, membentuk komunitas, dan adanya saling keterhubungan sesama pengguna media sosial tersebut. Karakteristik tersebut telah menempatkan siapa saja pada satu situasi baru yang berbeda dengan situasi sebelumnya. Suatu situasi yang lebih dinamis dan terbuka yang terselenggara dalam satu arena *virtual* pada lingkup jenis media baru.

Beberapa poin penting dalam lingkup media baru dapat merujuk pada karakteristik sebagai berikut (Lister, et al., 2010):

- a) Pengalaman tekstual yang baru, seperti membaca dalam format digital.
- b) Cara baru untuk berinteraksi global, seperti 3G dan 4G berbasis layar.
- c) Hubungan yang baru antara produsen dan konsumen, seperti berbagai aplikasi transaksi berbasis internet.
- d) Pengalaman baru tentang hubungan antara identitas dan komunitas, seperti terbentuknya komunitas *virtual*.
- e) Konsepsi baru tentang hubungan tubuh biologis dengan media teknologi, seperti kepalasuan tubuh biologis.
- f) Komunikasi yang baru diperantarai komputer, seperti email, ruang obrolan, forum komunikasi berbasis *avatar*, transmisi gambar suara, *world wide web* (www), media sosial, situs jejaring, dan telepon seluler.

- g) Semua cara baru dalam mendistribusikan dan mengonsumsi teks media yang memiliki ciri hiper-interaktif dan format *hypertextual*, seperti CD, DVD, dan berbagai *platform* komputer lainnya.
- h) Realitas baru berbentuk *virtual*, seperti lingkungan sosial yang dihadirkan dalam kemasan *virtual* dalam bentuk *selfie*, memunculkan budaya pamer.

Dengan berbagai karakteristik tersebut, aktivitas di media sosial memberi kemungkinan pada setiap orang untuk saling berbagi informasi secara luas atau terbatas pada orang yang dikehendaknya. Melalui karakteristik salurannya, media sosial dapat mengidentifikasi arah pesannya (Kent, 2010, hlm. 643-656) atau menggunakan alat khusus seperti *Facebook* atau *Twitter* untuk menunjukkan model interaksinya (Howard dan Parks, 2012, hlm. 359-362). Interaksi dan penyebaran informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber di internet atau memproduksinya sendiri. Di Indonesia, aktivitas tersebut menjadi meningkat lebih dinamis karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberi keleluasaan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat mereka di media sosial. Dengan demikian secara tidak langsung, *netizen* dan media sosial dapat berperan sebagai agen perubahan politik (Gordon, 2017).

Mengacu pada survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2017), sebanyak 87,13% (dari 54,68% penduduk Indonesia (atau 143,26 juta jiwa) penduduk Indonesia menghabiskan waktu mereka di internet dengan menggunakan media sosial. Dalam praktiknya, media sosial yang sering banyak dikunjungi atau digunakan oleh pengguna media sosial di Indonesia adalah *Facebook* sebesar 71,6 juta atau sekitar 54%. Selanjutnya pengguna *Instagram* sebesar 19,9 juta atau sekitar 15%, disusul kemudian pengguna *Youtube* 14,5 juta atau sekitar 11%. Sementara pengguna *Twitter* ada di urutan kelima sebesar 7,2 juta atau sekitar 5,5% setelah pengguna *Google+* sebesar 7,9 juta atau sekitar 6% dari pengguna media sosial di Indonesia. Secara umum aktivitas pengguna media sosial seperti *Facebook*, *Instagram* atau *Twitter* tersebut digunakan *netizen* sebagai saluran untuk berkomunikasi, bersosialisasi atau berbagi informasi dengan se-

sama pengguna media sosial (Ezumah, 2013; Basilisco dan Jin, 2015, hlm. 27-34; Basilisco & C. K. Jin, 2015, hlm. 191-194).

Selanjutnya mengacu pada survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2017) tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 129,2 juta (97,4%) dari total pengguna internet di Indonesia menjadikan media sosial sebagai jenis konten yang paling sering diakses. Data tersebut menunjukkan bahwa setengah lebih penduduk Indonesia atau 129,2 juta dari 256,2 juta penduduk Indonesia menggunakan media sosial sebagai konten yang paling sering diakses untuk memenuhi segala kebutuhan informasi mereka. Kehadiran media sosial yang digunakan sebagai sumber informasi khalayak tersebut telah mengubah pola interaksi sosial atau interaksi antar individual pada era media baru.

Latar belakang tersebut memberi perspektif yang dinamis dari aktivitas di ruang media sosial. Aktivitas tersebut memungkinkan terbentuknya berbagai konstruksi sosial baru dalam suatu realitas *virtual*. Suatu realitas yang mengandaikan pertemuan personal di ruang *virtual* dalam berbagai bentuk. Bentuk tersebut dapat hadir dalam konstruksi relasi yang lebih intim, terbuka, bersifat setara, terkadang saling terikat, penuh perhatian, solidaritas dan berbagai atribut relasi sosial lainnya dalam suatu tatanan masyarakat baru kosmopolitan. Suatu masyarakat yang dibangun berdasarkan prinsip moral universal dengan menepis berbagai identitas yang bersifat sektoral, komunal, regional bahkan nasional.

Masyarakat kosmopolitan dalam ruang *virtual* menjadi gagasan baru yang hendak diketengahkan dalam artikel ini. Suatu gagasan yang ingin menawarkan kontribusi baru tentang prospek muslim kosmopolitan sebagai *netizen* yang kesehariannya terjerat jejaring media sosial. Hal ini secara spesifik berkaitan dengan berbagai aktivitas di media sosial, terutama pada beberapa isu yang menjadi perbincangan *netizen* terkait dengan isu moral universal kosmopolitan. Tentu saja artikel ini tidak akan mengulas satu persatu pengguna media sosial secara mendalam terkait aktivitas mereka di media sosial, tetapi akan menyajikan berbagai aktivitas di media sosial yang fenomenal sebagai salah satu bentuk yang mendorong gagasan muslim kosmopolitan.

Secara spesifik, artikel ini akan merujuk pada *Aksi Bela Islam 212* sebagai suatu bentuk gerakan sosial-keagamaan yang muncul dari aktivitas di media sosial. Sebuah kategori yang mengisyaratkan suatu konsep masyarakat Islam yang memiliki solidaritas, masyarakat Islam yang dibangun di atas prinsip kasih sayang, saling menjaga dan melindungi, rela berkorban, penuh kebersamaan, persaudaraan, taat aturan, memuat ekspresi pergerakan, keberagaman, kesetaraan, toleransi aliran bahkan mencerminkan fesyen sebagai refleksi kepribadian muslim dan muslimah sosialita masyarakat urban.

### **Aktivitas Masyarakat Siber dan Gerakan Sosial di Indonesia**

Aktivitas di media sosial dapat dipahami sebagai kegiatan *netizen* atau masyarakat siber (*cybersociety*) dalam memproduksi konten media sosial, yakni kegiatan yang terkait dengan proses mencari, membaca, menyimpan dan menyebarkan berbagai materi atau konten media sosial. Johns (1994) menyebut istilah *cybersociety* (masyarakat siber) sebagai bentuk dari formasi sosial baru, efek dari perkembangan internet atau teknologi canggih. Komunitas siber ini bergantung pada *computer-mediated communication*, seperti email dan sosial media lainnya, dalam berbagi pemikiran dan informasi secara instan melintasi batas jarak yang sangat jauh.

Sedangkan kata *netizen* diciptakan oleh Michael Hauben pada tahun 1995 dengan menggabungkan dua kata *Network* (Jaringan) dan *Citizens* (Warga Negara). Pada waktu itu, Michael adalah seorang mahasiswa pascasarjana Universitas Columbia, AS. *Netizen* berarti warga negara yang berada pada sistem jaringan digital, atau warga jaringan (*net citizens*). Hal tersebut berarti semua orang yang menggunakan jaringan digital, seperti internet, untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk mencari informasi, atau menyampaikan ekspresi ide mereka melalui sebuah jaringan internet (Hauben & Hauben, 1997).

Materi atau konten tersebut dapat berupa teks tulisan, berbagai jenis gambar, *visual*, *audio* atau video. Aktivitas *netizen* di media sosial dapat menjadikan seorang *netizen* sebagai produsen informasi, distributor informasi sekaligus menjadi konsumen informasi. Maraknya penggunaan media sosial di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir

bertepatan dengan gelombang protes politik di seluruh dunia. Tapi apakah media sosial berperan dalam menghasut demonstrasi, aksi sosial atau isinya hanya mencerminkan preferensi populasi? Para ahli berpendapat bahwa media sosial memang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya demonstrasi politik dan aksi sosial (Edmond, 2013, hlm. 1422-1458; lihat juga Little, 2015, hlm. 152-166).

Di Indonesia, beberapa aksi demonstrasi atau aksi sosial yang terjadi didorong atau didahului aktivitas sebelumnya di media sosial. Bahkan, saat aksi demonstrasi atau aksi sosial tersebut sedang berlangsung, peserta aksi dapat berkicau di media sosial. Kicauan yang disampaikan langsung dari lokasi demonstrasi atau aksi tersebut memungkinkan peserta yang tak ikut aksi demonstrasi menyampaikan tuntutan mereka melalui media sosial (Papic dan Noonan, 2011). Mengacu riset Nugroho (2012), dan Lim (2014a, hlm. 636-657), beberapa aksi unjuk rasa di Indonesia didorong aktivitas di media sosial. Gerakan sosial yang didorong aktivitas dalam media sosial yang sangat menonjol adalah kasus *Prita Mulyasari vs Rumah Sakit (RS) Omni International* atau kasus *Cecak vs Buaya*. Pada kasus Prita, aksi sosial dimulai dari surat Prita di *mail list* yang mengeluhkan pelayanan RS Omni International, Tangerang. Keluhan tersebut dinilai oleh pihak RS sebagai bentuk pencemaran nama baik. Selanjutnya Prita dituntut dan sempat mendekam di penjara. Namun hukuman tersebut justru memicu simpati dan solidaritas publik. Melalui media sosial, publik lantas menggalang dukungan agar Prita segera dapat dibebaskan. Gerakan ini mengusung *hashtag* #saveprita (Kompas Online, 3 Juni 2009). Atas kasus tersebut dan kuatnya aksi massa, Prita akhirnya dibebaskan dari tuntutan hukum (Hukum Online, 18 September 2012).

Gerakan sosial lainnya yang didorong oleh aktivitas media sosial terajadi dalam kasus penahanan komisioner KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Bibit Candra oleh Kepolisian Republik Indonesia (Tempo Online, 16 September 2009). Belakangan kasus tersebut dikenal dengan istilah *Cecak vs Buaya* untuk merepresentasikan *KPK vs Polri*. Istilah *Cecak vs Buaya* sendiri awalnya diperkenalkan oleh Irjend Pol. Susnoduadji untuk menggambarkan *KPK vs Polri* (Viva News, 6 November 2009). Gerakan ini mengusung *hashtag* #saveKPK. Aksi

demonstrasi tersebut mampu memberi perubahan politik setelah Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia saat itu meminta kasus tersebut tidak dilanjutkan (Detikcom, 23 November 2009).

Namun demikian, tidak selalu aktivitas di media sosial yang dapat menimbulkan aksi demonstrasi akan memberikan perubahan politik. Pada kasus adanya penyimpangan (dugaan korupsi) oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta terhadap Rumah Sakit Sumber Waras, aktivitas di media sosial menstimulasi aksi protes. Aksi protes warga tersebut meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Sindo Online, 4 Februari 2016). Namun aksi protes tersebut tidak berdampak pada perubahan politik yang diinginkan warga Jakarta. KPK beralasan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak memiliki niat jahat melakukan korupsi (Vivanews, 12 April 2016).

Walaupun aksi protes tersebut tidak menghasilkan perubahan politik yang diinginkan, namun khalayak *netizen* tetap mengingat dan membahasnya di media sosial. Aktivitas ini menurut Zappavigna (2012) sebagai ‘percakapan yang dapat dicari’ (*searchable talk*). Yaitu suatu percakapan online dimana seorang *netizen* berafiliasi dengan *netizen* lainnya untuk membuat diskursus mereka dapat dicari sebagai *digital identity* di media sosial terutama di media sosial (Thomborrow, 2015; lihat juga Warburton & Hatzipanagos, 2013; Murthy, 2013).

Aktivitas di media sosial seperti ini merupakan variasi yang bersifat temporal. Pada waktu (tempo) dan kasus yang berbeda, percakapan tersebut dapat muncul kembali untuk meningkatkan intensitas di media sosial. Intensitas tersebut akan memiliki kekuatan yang lebih besar dari aktivitas di media sosial sebelumnya. Variasi temporal dan intensitas di media sosial ini selanjutnya dapat mendorong aksi demonstrasi. Hal ini memberikan bukti mengenai hubungan antara aktivitas di media sosial dan demonstrasi sebagai gerakan sosial berikutnya.

Pada peristiwa *Aksi Bela Islam* yang terjadi beberapa kali karena dipicu oleh adanya dugaan penistaan kitab suci al-Qur’an oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, merupakan peristiwa yang berbeda dengan aksi protes pada kasus RS Sumber Waras sebelumnya. Walau peristiwa dan waktunya berbeda, namun

percakapan di media sosial yang bebas selalu mengaitkannya karena terkait dengan orang (pelaku) yang sama. Peristiwa penistaan kitab suci al-Qur'an dilakukan oleh Ahok, dugaan korupsi pada kasus RS Sumber Waras juga melibatkan Ahok. Faktor ini menimbulkan intensitas percakapan yang tinggi di media sosial. Perbincangan di media sosial tersebut menjadi intensif karena menyangkut kitab suci umat Islam sebagai agama penduduk mayoritas Indonesia.

Aktivitas *netizen* yang saling terhubung di media sosial disebut Klein (dalam Porta, 2013) sebagai '*web like image*'. Aktivitas di media sosial seperti jaring laba-laba. Dalam jaringan tersebut ada bagian inti (pusat jaringan) sebagai pusat seluruh aktivitas media sosial. Pusat inti jaringan (*hubs*) tersebut dihubungkan oleh seorang aktor sebagai perantara (*bridge*). Aktor perantara ini menyebarkannya pada aktor jaringan lainnya. Aktor sebagai perantara yang mendinamisir aktivitas di media sosial tersebut saling menstimulasi aktor lainnya.

Saling stimulasi antar aktor dalam satu kelompok kepentingan dengan aktor lainnya yang melakukan hal serupa pada kelompok yang berbeda. Mengacu pada Lim (2014a) aktivitas di media sosial tersebut memunculkan *hidden transcript*, yaitu kritik khalayak terhadap penguasa melalui berbagai saluran media sosial lain yang lebih terbatas dan tertutup seperti grup *WhatsApp*. Berbagai perbincangan terbatas sesama anggota kelompok yang saling mengenal akan meningkatkan intensitas perbincangan pada jenis media sosial yang lebih terbuka seperti *Twitter* dan *Facebook*.

Lim (2014b, hlm. 51-72) berargumen bahwa aktivitas di media sosial dapat berubah menjadi keterlibatan masyarakat atau mendorong gerakan sosial dalam bentuk aksi massa atau demonstrasi terjadi karena konten media sosial yang disampaikan bersifat sederhana, aksi yang dilakukan memiliki resiko rendah, tema yang diperbincangkan sesuai dengan narasi besar seperti nasionalisme dan keagamaan serta tidak bertentangan dengan narasi yang diusung oleh media massa arus utama. Aktivitas di media sosial ini akan terkait dengan kekuatan media berbasis internet sebagai bentuk media baru. Hal ini menegaskan bahwa pada awalnya media sosial memang diciptakan untuk menghubungkan diri mereka secara pribadi dengan komunitasnya yang terpi-

sah secara fisik agar memudahkan mereka untuk berbagi ide, gagasan dan pengalaman. Namun media sosial juga dapat menstimulasi antara penggunanya untuk melakukan aksi protes (Kaplan dan Haenlein, 2010, hlm. 59-68).

Berbagai aktivitas di media sosial tersebut menggambarkan bahwa media sosial menjadi ruang publik yang sangat liberal. Kondisi ini dapat digambarkan sebagai liberalisasi ruang publik pada ruang *virtual*. Hal-hal yang semula tabu dan sakral untuk diperbincangkan di dunia nyata, menjadi lebih mudah dibuka, dibicarakan bahkan dicerca di media sosial. Liberalisasi ruang publik di media sosial tersebut memungkinkan bagi siapa saja untuk menyampaikan pendapat mereka. Hal ini dapat terjadi karena pendapat yang ingin disampaikan melalui media sosial tersebut tanpa kontrol dari dunia sosial seperti yang terjadi dalam sebuah pembicaraan langsung. Hal ini menunjukkan media sosial berkembang ke arah visi demokrasi liberal (Jiang, 2013).

Bessiere, Kraut, dan Boneva (2008, hlm. 47–70) menjelaskan adanya perbedaan dalam pemanfaatan penggunaan internet (media sosial) dan dampak yang dihasilkan antara individu yang memiliki dukungan sosial dengan individu yang tidak memiliki dukungan sosial sama sekali di lingkungannya. Interaksi personal seseorang dengan orang lain di media sosial yang saling mengenal sebelumnya merupakan lingkungan yang mendukung bagaimana bentuk relasi dan reaksi antar *netizen* selanjutnya. Dalam kehidupan nyata antar *netizen* mungkin sudah saling mengenal dengan baik, maka relasi mereka di media sosial akan berbeda dengan mereka yang tidak mengenal dengan baik sebelumnya. Namun uniknya, aktivitas di media sosial juga dapat merenggangkan hubungan baik antar *netizen* yang sudah memiliki relasi cukup baik dalam kehidupan nyata yang mereka jalani.

Gerakan sosial berikutnya yang didahului atau dimediasi oleh aktivitas di media sosial adalah *Aksi Bela Islam*. Aksi ini dilakukan berkali-kali untuk menuntut hukuman yang adil terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu diduga melakukan penistaan terhadap Al-Qur'an, kitab suci umat Islam. Namun di antara aksi tersebut *Aksi Bela Islam III* pada tanggal 2 Desember 2016 merupakan aksi terbesar yang paling fenomenal. Aksi ini kemudian dikenal

dengan *Aksi Bela Islam 212*. *Aksi Bela Islam 212* ini yang kemudian secara spesifik hendak dirujuk sebagai peristiwa yang mengandung prospek konstruksi realitas muslim kosmopolitan.

### **Memahami Konstruksi Muslim Kosmopolitan: Kasus Aksi Bela Islam 212**

Aksi Bela Islam merupakan gerakan sosial keagamaan dalam bentuk demonstrasi atau unjuk rasa. Peserta aksi demonstrasi menuntut agar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disebut dengan Ahok, dihukum karena saat itu diduga telah melakukan penistaan terhadap agama Islam ([Tempo Online, 9 Mei 2017](#)). Aksi tersebut dikoordinir oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang dipimpin oleh Ustaz Bachtiar Nasir (Detikcom, 1 November 2016). Menurut catatan *Republika* ([Republika Online, 10 Mei 2017](#)), Aksi Bela Islam sudah dilakukan sebanyak tujuh kali, yaitu pada:

- Aksi Bela Islam I, tanggal 14 Oktober 2016 (Aksi 1410)
- Aksi Bela Islam II, tanggal 4 November 2016 (Aksi 411)
- Aksi Bela Islam III, tanggal 2 Desember 2016 (Aksi 212)
- Aksi Bela Islam IV, tanggal 11 Februari 2017 (Aksi 112)
- Aksi Bela Islam V, tanggal 21 Februari 2017 (Aksi 212 jilid II)
- Aksi Bela Islam VI, tanggal 31 Maret 2017 (Aksi 313)
- Aksi Bela Islam VII, tanggal 5 Mei 2017 (Aksi 55)

Di antara tujuh kali Aksi Bela Islam tersebut, aksi Aksi Bela Islam III yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2016 merupakan aksi yang tercatat paling besar dalam sejarah aksi unjuk rasa di Indonesia. Sehingga Aksi ini dikenal dengan Aksi Bela Islam 212. Menurut laporan *Republika* ([Republika Online, 5 Desember 2016](#)), Aksi Bela Islam 212 diikuti sekitar 5 hingga 7 juta orang yang datang ke Jakarta dari segala penjuru Indonesia.

Kendati jumlah peserta Aksi Bela Islam 212 yang hadir demikian besar, dan sempat dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemasan, ([BBC com, 1 Desember 2016](#)), namun aksi tersebut terselenggara de-

ngan aman, tertib, bersih dan damai. Khalayak dari segala penjuru Indonesia mendatangi Monas (Monumen Nasional) di Jakarta sebagai pusat lokasi aksi massa. Kendati dengan sempit berbagai cara mereka dihadang untuk hadir dalam aksi, atau diancam akan dicabut ijin trayek bagi perusahaan bus yang mengangkut peserta Aksi Bela Islam 212 (Rakyat Merdeka online, 28 November 2016), namun sejumlah peserta yang telah bulat tekadnya tetap berangkat. Sebagian mereka bahkan memilih berjalan kaki dari Ciamis menuju Jakarta (Republika online, 30 November 2016).

Peristiwa Aksi Bela Islam 212 dapat memberi kontribusi bagi kategori baru dalam membentuk konstruksi sosiologis umat muslim Indonesia. Sebuah kategori yang mengisyaratkan konsep masyarakat Islam yang memiliki solidaritas, masyarakat Islam yang dibangun di atas prinsip kasih sayang, saling menjaga dan melindungi, rela berkorban, penuh kebersamaan, persaudaraan, taat aturan, memuat ekspresi pergerakan, keberagaman, kesetaraan, toleransi antar aliran bahkan mencerminkan fesyen sebagai refleksi kepribadian muslim dan muslimah sosialita masyarakat urban. Dalam wujud lebih luas, masyarakat Islam pada Aksi Bela Islam 212 terdapat pula kalangan non-muslim yang ikut bergabung, bahkan turut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, Kapolri dan sejumlah menteri. Kehadiran dan berbaurnya masyarakat non-muslim dan Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, Kapolri serta sejumlah menteri tersebut di tengah massa dengan damai dan penuh semangat kebersamaan, persaudaraan dan kebhinekaan merupakan wujud dari prinsip kosmopolitan.

Gagasan tentang kosmopolitanisme dapat ditelusuri pada pemikiran bergaya sinisme Diogenes pada era Yunani Kuno. Suatu saat Diogenes pernah ditanya tentang asal-usulnya. Dia kemudian menjawab, “*Saya adalah seorang warga dunia*” (Anderson, 1998). Ungkapan tersebut kemudian dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah *kosmopolites* (Anderson, 1998). Nussbaum (1997, hlm.1-25) menilai, ungkapan Diogenes tersebut sebagai gagasan perintis bagi hilangnya sekat sosial dan batas identitas bangsa warga negara. Gagasan kosmopolitan ini kemudian dikembangkan oleh para filosof *Stoa* dengan konsep kemanusiaan universal. Bahwa setiap manusia hidup

dalam dua sisi sosial. Pertama, sisi sosial tempat dimana setiap manusia lahir, tumbuh dan berkembang sebagai anggota masyarakat. Kedua, sisi sisi global dimana argumentasi, aspirasi dan hak asasinya sebagai manusia secara keseluruhan diakui.

Kekuatan moral gagasan kosmopolitanisme tersebut selanjutnya dikembangkan filosof era modernisme Immanuel Kant (1724-1804) dalam artikelnya *Perpetual Peace* (Damai Tanpa Henti). Gagasannya menentang bahwa kosmopolitanisme pada prinsipnya berfungsi mulia melindungi setiap manusia dari ancaman perang. Kant kemudian mengurai gagasannya dengan bersandar pada prinsip keramah-tamahan universal (*universal hospitality*). Gagasan kosmopolitan semakin kokoh saat dunia dilanda berbagai perang dan kerusuhan sosial atau sebagai bentuk reaksi terhadap bencana kemanusiaan (Beck, 2006).

Berikutnya gagasan mulia kosmopolitanisme tersebut juga menarik pemikir filsafat postmodernisme, Jacques Derrida. Bagi Derrida konsep keramahan adalah kesediaan dan penerimaan terhadap orang lain (*the other*) dalam sebuah ruang (rumah). Etika, menurut Derrida menjadi dasar keramah-tamahan yang murni dari hubungan antar sesama manusia. Keramahan etik membuka penerimaan terhadap segala bentuk perbedaan dalam kehidupan yang dilandasi oleh kesamaan derajat kemanusiaan. Oleh sebab itu, alienasi dan isolasi dalam kehidupan sosial tidak dibenarkan karena relasi terbaik bagi manusia adalah interaksi yang penuh keramah-tamahan sesama manusia (Nussbaum, 1997, hlm. 1-25).

Sehingga dasar filosofis dari kosmopolitanisme adalah moral universal yang mengajarkannya semua manusia patuh pada nilai etik dan moral yang sama (Appiah, 2006). Gagasan Islam Kosmopolitan yang hendak diajukan secara konseptual sesungguhnya merupakan gagasan pemikiran tentang eksistensi manusia sebagai subjek kehidupan dan relasinya dengan sesuatu di luar diri yang mengatur kemanusiaannya. Dalam kehidupan sosial, manusia dapat bertindak sebagai subjek individu yang bebas namun pada saat bersama manusia juga bagian dari sebuah sistem sosial yang dapat diatur. Berbagai relasi tersebut secara lebih spesifik akan menempatkan relasi antara manusia sebagai warga negara yang beragama dalam sebuah negara. Dalam perspektif

ini, masyarakat kosmopolitan dapat mengacu pada berbagai gagasan lain tentang relasi warga negara yang beragama dengan negara, terutama di dunia Barat yang liberal.

Liberalisme di Barat muncul dari proses sejarah perlawanan menghadapi otokrasi religius. Akar filosofinya adalah pencerahan yang diterima sebagian besar masyarakat Barat. Saat ini, sebagai paham, liberalisme bahkan melampaui posisi politik yang sah (Bell, 2014, hlm. 682-715). Relasi antara warga negara yang beragama dengan negara dalam pandangan liberalisme jelas menganggap suatu yang religius bersifat *komunal* yang dapat menanamkan intoleransi. Hal ini berbeda dengan pandangan umum liberalisme mengenai rasional praktis tentang pandangan individu sebagai individual (Nicolacopoulos, 2008). Individual sebagai warga negara berdasarkan prinsip kemanusiaan universal tersebut telah meletakkan asumsi tentang warga negara global yang mendorong superioritas individual.

Akibatnya, kewarganegaraan global sering kali tumpang tindih dengan kosmopolitanisme, seperti dalam karya Derek Heater (1996). Sedangkan Luis Cabrera menyatakan bahwa bukannya sinonim, konsep kewarganegaraan global “dapat dipahami sebagai bentuk yang sangat terealisasi dari kosmopolitanisme individual” (Cabrera, 2010, hlm. 13). Itu pula sebabnya kosmopolitan juga dapat dimaknai sebagai liberalisme selektif, yaitu konsepsi sempit untuk membedakan antara kosmopolitanisme dan kewarganegaraan global sebagai tantangan konseptual. Sebagai bagian dari aturan global, kewarganegaraan global dan kosmopolitanisme (dalam manifestasi liberalnya) terkait erat dengan proyek statistik dan imperialis. Sebuah keterkaitan yang biasanya dilewatkan dalam sejarah intelektual. Studi Derek Heater (1996) melacak sejarah ide kewarganegaraan dunia, tetapi tidak ide pemerintahan dan negara. Serupa dengannya, Appiah (2006) berfokus pada nilai-nilai individual, mengabaikan konteks sosial dan historis dimana nilai-nilai itu dihasilkan, disebar, dan ditegaskan.

Dalam relasinya dengan liberalisme, Ulrich Beck (2000, hlm. 79-105; Beck, & N. Sznaider, 2006, hlm. 1-23) meletakkan kosmopolitanisme liberal di dalam sejarah global kontemporer, menghubungkan praktek kosmopolitanisme yang berbatasan dengan munculnya globali-

sasi neoliberal pada akhir abad kedua puluh, sebagai dasar dari apa yang dia sebut sebagai “jaman kedua modernitas”. Beck menggunakan istilah kosmopolitanisme sebagai memiliki hubungan dengan kewarganegaraan global. Pandangan ini berhubungan dengan penolakan terhadap batasan nasionalisme yang dibentuk oleh ruang dan waktu. Beck ingin melawan klaim ideologis yang dibawa berbagai narasi besar ideologis pasca berakhirnya perang dingin yang keunggulan kapitalisme atas sosialisme. Keunggulan kapitalisme dapat ditundukkan dengan kosmopolitanisme liberal yang menjanjikan toleransi untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, kosmopolitanisme menawarkan pendekatan atau metode baru bagi ilmu sosial tentang ontologi negara liberal dalam arena global sebagai bagian dari kewarganegaraan global. Gagasan kosmopolitanisme liberal tersebut kemudian seringkali mewakili gagasan tentang muslim kosmopolitan. Suatu gagasan yang dipraktikkan sebagai panterasi pemikiran liberal ke dalam Islam melalui penyebaran gagasan bahwa gagasan besar tentang demokrasi, toleransi atau kesetaraan juga sejalan dengan Islam. Ajaran Islam kemudian mengalami proses liberalisasi agar terlihat menarik bagi orang yang melihat Islam sebagai paham kejahatan (Kurzman, 1999, Binder, 1988). Namun belakangan ini sejumlah akademisi mulai melakukan koreksi dan pemetaan terhadap gagasan tentang kosmopolitanisme, terlebih-lebih gagasan tentang kosmopolitanisme muslim.

Berbagai koreksi tersebut meletakkan kosmopolitanisme dalam perspektif muslim menentang konstruksi gagasan tentang liberalisme Barat yang memiliki bias anti agama. Beberapa akademisi seperti Zubaida (2002, hlm. 32-41) dan Alavi (2015) menawarkan gagasan kosmopolitanisme dalam perspektif sejarah. Perspektif tersebut kemudian diletakkan pada pusat imperial masyarakat urban yang datang dari segala penjuru. Akademisi, politisi, pedagang hingga petualang datang dan pergi silih berganti sehingga melahirkan simpul kosmopolitanisme. Masyarakat urban menjadi konsep penting selanjutnya untuk membahas kosmopolitanisme muslim. Urban dipahami sebagai situs ekspresi artistik melampaui batas negara (Dadi, 2006) dan aliran budaya atau fesyen sebagai refleksi pengalaman pribadi (Tarlo, 2017, hlm. 143-

172). Ekspresi kosmopolitanisme Muslim tersebut secara historis dapat ditelusuri saat migrasi pertama masyarakat Muslim dari Mekkah ke Yastrib (Madinah), yang dikenal dan dikenang sebagai *hijrah*.

*Hijrah* kemudian dikenang tak saja sebagai proses migrasi secara fisik tetapi mengalami proses gagasan berbagai konsepsi sosial. Selanjutnya *Hijrah* digagas sebagai konsep masyarakat Islam yang memiliki solidaritas tanpa batas, masyarakat Islam yang dibangun di atas prinsip kasih sayang, saling menjaga dan melindungi, rela berkorban, penuh kebersamaan, persaudaraan, taat aturan, memuat ekspresi pergerakan, keberagaman, kesetaraan, toleransi aliran bahkan mencerminkan *fesyen* sebagai refleksi kepribadian muslim sosialita masyarakat urban. Jika berbagai gagasan tersebut dikombinasi sesungguhnya juga akan mengungkap berbagai muatan nilai dan gagasan kosmopolitan liberal.

Setelah umat muslim yang *hijrah* tiba di Madinah, Nabi Muhammad Saw., pertama kali membuat komunitas inklusif, masyarakat kosmopolis. Sebuah umat terdiri dari penganut Islam dan bukan penganut Islam, muslim dan non-muslim, didasarkan pada pergerakan dan keberakaran tentang konsep masyarakat Islam yang memiliki solidaritas. Masyarakat Islam yang dibangun di atas prinsip kasih sayang, saling menjaga dan melindungi, rela berkorban, penuh kebersamaan, persaudaraan, taat aturan, memuat ekspersi pergerakan, keberagaman, kesetaraan, toleransi antar aliran. Bahkan dalam salah satu ceramah, Nabi Muhammad Saw., menjelaskan kandungan tentang etika kosmopolitan. Hal tersebut dapat dilihat dalam perintah nabi untuk melindungi hak-hak dasar manusia dan kemuliaannya sebagai sesama manusia, walaupun berbeda agama dan keyakinan seperti dalam sabda beliau: *“Barang siapa yang menzalimi seseorang mu’ahid (seorang yang telah dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaniya di luar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat.”* (Ash Shiddieqy, 1999, hlm. 23)

Di Madinah tersebut, Nabi Muhammad Saw., telah meletakkan prinsip dasar tentang masyarakat kosmopolitan sebagai sebuah citra masyarakat terbuka, toleran, tidak ada pertemuan budaya yang saling menekan tapi juga tidak ada percampuran keyakinan. Masyarakat

kosmopolitan yang dibentuk oleh Nabi Muhammad Saw., adalah masyarakat terbuka, bukan masyarakat yang eksklusif dan tertutup, tetapi tetap berusaha menjaga keyakinan, tetap murni, tidak mencampurkan budaya atau tradisi yang saling mengimpresi. Tidak ada budaya atau perseorangan yang terisolasi karena memiliki perbedaan fisik dengan lainnya. Tatanan masyarakat tersebut terjaga dalam keanggotaan masyarakat urban yang silih berganti datang dan pergi, tidak ada afiliasi pada kepentingan kelompok tertentu antara kelompok pendatang dan kelompok yang menetap. Kosmopolitanisme Muslim menolak singularitas dan absolutisme yang mewujud dalam berbagai bentuk pertemuan berbagai kalangan seperti akademisi, seniman dan sebagainya melalui gerakan global aksi ketakwaan, seperti ibadah Haji (Lawrence dan Cooke, 2015).

### Simpulan

Kehadiran media sosial menandai lahirnya era media baru. Suatu era yang mampu menghantarkan berbagai perubahan dalam berbagai sektor kehidupan, berbagai relasi sosial, termasuk perubahan pada beberapa gagasan tentang masyarakat dan berbagai konsep yang terkait dengannya. Berbeda dengan realitas pada era media massa tradisional yang sistem produksi kontennya memiliki standar dan mekanisme kerja yang prosedural, terukur dan spesifik, namun pada era media baru, media sosial dapat digunakan secara lebih leluasa oleh penggunanya yang biasa disebut dengan *netizen*. Berbagai opini tentang berbagai hal dapat disampaikan oleh netizen dengan lebih seketika (*real time*) dan interaktif melalui media sosial.

Aktivitas netizen di media sosial tersebut yang membahas berbagai hal aktual secara eskalatif dapat mendorong gerakan sosial dalam berbagai bentuk seperti aksi demonstrasi. Salah satu gerakan sosial dalam sektor keagamaan yang cukup fenomenal adalah Aksi Bela Islam 212. Aksi Bela Islam 212 yang sebelumnya didahului oleh adanya eskalasi aktivitas di media sosial tersebut merupakan fenomena yang dirujuk sebagai potret muslim kosmopolitan di Indonesia. Potret Muslim kosmopolitan Indonesia merupakan gambaran berkumpulnya warga negara karena didorong oleh kesadaran religius mereka tanpa sekat

sosial, politik, ekonomi bahkan lintas religiusitas. Potret tersebut kemudian menjadi dasar bagi terbukanya prospek kehidupan Muslim kosmopolitan yang menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan universal.

### **Acknowledgement**

Saya ingin menyampaikan terima kasih pada Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Al Makin dan Dr. Phil. Sahiron, MA yang telah memberikan wawasan dan keahlian mereka dalam hal menulis laporan penelitian untuk sebuah artikel ilmiah. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada Dr. H. Mochamad Sodik, M. Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga yang telah memberi dukungan atas penelitian dan penulisan artikel ini. Secara khusus saya juga ingin menyampaikan terima kasih pada Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pusat Bapak Prof. Dr (HC). KH. Ma'ruf Amin yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan peneliti seputar prospek umat muslim Indonesia pasca Aksi Bela Islam. Tanpa mereka semua, tentu naskah ini tak dapat saya susun.

### **Referensi**

- [Ahok dihukum dua tahun, putusan hakim bulat. \(2017, Mei\). \*Tempo Online\*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/09/063873676/ahok-dihukum-dua-tahun-putusan-hakim-bulat>](https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/09/063873676/ahok-dihukum-dua-tahun-putusan-hakim-bulat)
- Akhirnya MA bebaskan Prita Mulyasari. (2012, September). *Hukum Online*. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5057d8e58f799/akhirnya--ma-bebaskan-prita-mulyasari>.
- Aksi Demo 411, 212, dan efek trauma yang membayangi pengusaha (2018, Maret). *BBC*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38157870>

- Alavi, S. (2015). *Muslim cosmopolitanism in the Age of Empire*. Cambridge: Harvard University Press.
- Anderson, A. (1998). Cosmopolitanism, universalism and the devided legacies of modernity dalam Cheah., P & Robbins., B (Ed), *Cosmopolitics: Thinking and Feeling Beyond The Nation*, hal. 265-289. Minneapolis and London: University of Minnesota.
- APJII. (2017). Infografis panetrasi dan prilaku pengguna internet di Indonesia, diakses dari <https://www.apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2017>
- Appiah, K. (2006). *Cosmopolitanism ethics in a world strangers*. London: Penguin Book.
- Ash-Shiddieqy, T.M.H. (1999). *Islam dan hak asasi manusia*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Basilisco, R. & Jin, C. K. (2015). Uses and gratification motivation for using facebook and the impact of facebook usage on social capital and life satisfaction among filipino users. *International Journal of Software Engineering and Its Applications* , 9(4), 191-194.
- Beck., U. (2000). The Cosmopolitan ethic: Sociology of the second age of modernity. *British Journal of Sociology*. 51(1), 79-105.
- Beck., U & Sznaider., N. (2006). unpacking cosmopolitanism for the social sciences: a research agenda. *British Journal of Sociology*, 57(1), 1-23.
- Bell., D. (2014). What is Liberalism?. *Political Theory*, 42(6), 682-715.
- Bessiere., K., Kiesler., S, Kraut., R.E., & Boneva, B. (2008). Effects of internet use and social resources on changes in depression, information, communication society. *Information, Communication & Society*, 11(1), 47-70.
- Beck, U. (2006). *The cosmopolitan vision*. Cambridge: Polity Press.
- Binder, L. (1988). *Islamic liberalism: A Critique of development ideologies*. Chicago : University of Chicago Press.

- Cabrera, L. (2010). *The practice of global citizenship*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Disewakan untuk aksi 212, bus di Sumsel akan kehilangan izin trayek. (2016, November). *Rakyat Merdeka Online*. Diakses dari <http://www.rmolsumsel.com/read/2016/11/28/61638/Disewakan-n-untuk-Aksi-212,-Bus-di-Sumsel-Akan-Kehilangan-Izin-Trayek->
- Edmond, C. (2013). Information manipulation, coordination, and regime change. *Review of Economic Studies*, 80(4), 1422–1458.
- Ezumah, B.A. (2013). College students use of social media : Site preferences, uses and gratifications theory revisited. *International Journal of Business and Social Science*, 4(5), 27-34.
- GNPF-MUI serukan aksi damai 4 November 2016. (2016, November). *Detik.com*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3334908/gnpf-mui-serukan-aksi-damai-4-november-2016>
- Gordon, S. (2017). Online communities as agents of change and social movements. *Information Science Reference*. Harshey.
- Hauben, M. & Hauben, R. (1997). *Netizens: on the history and impact of usenet and the internet*. Los Alamitos, Calif. : IEEE Computer Society Press.
- Heater, D. (1996). *World citizenship and government: Cosmopolitan ideas in the history of western political thought*. New York: St. Martins Press.
- Howard, P. N., & M. R. Parks. (2012). Social media and political change: capacity, constraint, and consequence. *Journal of Communication*, 62(2), 359-362.
- I. Dadi. I. (2006). Miniature painting as Muslim cosmopolitanism. *ISIM Review*, 18(1)
- Inilah alasan polisi jadikan Bibit dan Chandra tersangka. (2009, September). *Tempo Online*. Diakses dari

<https://nasional.tempo.co/read/198331/inilah-alasan-polisi-jadikan-bibit-dan-chandra-tersangka>

Inilah curhat yang membawa Prita ke penjara. (2009, Juni). *Kompas Online*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2009/06/03/1112056/inilah.curhat.yang.membawa.prita.ke.penjara>.

[Jones, S. \(1994\). \*Cybersociety: Computer-mediated communication and community\*. Los Angeles: Sage Publications.](#)

[Jiang, J. \(2013\). \*Cyber nationalism in China: Challenging Western media portrayals of internet censorship in China\*. Cambridge: Cambridge University Press.](#)

KPK belum temukan niat jahat Ahok (2016, April). *Vivanews*. Diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/metro/759379-ahok-kpk-belum-temukan-niat-jahat-beli-lahan-sumber-waras>

KPK didesak periksa Ahok terkait RS Sumber Waras. (2016, Februari). *Sindo Online*. Diakses dari <http://metro.sindonews.com/read/1082775/170/kpk-didesak-periksa-ahok-terkait-rs-sumber-waras-1454574348>.

Kaplan, A.M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! the challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(2), 61-71.

Kent, M.L. (2010). Directions in social media for professional and scholars, dalam *Handbook of Public Realitions*, eds. R.L. Heath, hal 643-656. Thousand Oaks: Sage.

Kurzman, C. (Ed). (1998). *Liberal Islam: A sourcebook*. Oxford: Oxford University Press.

Lawrence, B., & Cooke, M. (2005). *Muslim networks from hajj to hip hop*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Lim, M. (2014a), Many clicks but little sticks: Social media activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636-657.

Lim, M. (2014b). Seeing spatially: People, networks, and movements in digital and urban spaces. *International Development and Planning Review*, 36(1), 51-72.

- Lister, M., et.al. (2010). *New media: A critical introduction*. London: Routledge.
- Little, A. (2015). Communication technology and protest. *Journal of Politics*, 78(1), 152-166.
- Mayfield, A. (2008). What is Social Media? [diakses dari http://www.icrossing.com/uk/ideas/fileadmin/uploads/ebooks/what\\_is\\_social\\_media\\_icrossing\\_ebook.pdf](http://www.icrossing.com/uk/ideas/fileadmin/uploads/ebooks/what_is_social_media_icrossing_ebook.pdf).
- Menghitung jumlah peserta aksi 212. (2016, Desember). *Republika Online*. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/12/05/ohou27415-menghitung-jumlah-peserta-aksi-212>.
- Murthy, D. (2013). *Twitter: Social communication in the Twitter Age*. Oxford: Wiley.
- Nicolacopoulos, T. (2008). *The radical critique of liberalism: In memory of a vision*. Melbourne: Re.press.
- Nugroho, Y., & Syarief, S.S. (2012), *Beyond click-activism? New media and political processes in contemporary Indonesia*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Nussbaum., M.C. (1997). Kant and Stoic cosmopolitanism. *The Journal of Political Philosophy*, 5(1), 1-25.
- Pagi ini massa aksi dari Ciamis melanjutkan jalan kaki menuju Jakarta. (2016, November). *Republika Online*. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/11/30/ohfmp384-pagi-ini-massa-aksi-dari-ciamis-melanjutkan-jalan-kaki-menuju-jakarta>
- Papic, M., & Noonan, S. (2011, February). Social media as a tool for protest. *Stratfor Global Intelligence*, diakses dari <https://www.stratfor.com/weekly/20110202-social-media-tool-protest>.
- Pidato lengkap SBY sikapi kasus Century dan Bibit Chandra. (2009, November). *Detikcom*. Diakses dari <http://news.detik.com/>

[berita/1247398/pidato-lengkap-sby-sikapi-kasus-century-dan-bibit-chandra](#)

Porta, D.D. (2013). *Can democracy be daved? Participation, deliberation, and social movement*. Cambridge: Polity Press.

[Rangkaian aksi bela Islam sebelum Ahok divonis 2 tahun penjara. \(2018, Maret\). \*Republika Online\*. Diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/05/10/opp5r4330-ini-7-rangkaian-aksi-bela-islam-sebelum-ahok-divonis-2-tahun-penjara>.](#)

Susno cerita asal muasal cicak vs buaya. (2009, November). *Viva News*. Diakses dari <https://www.viva.co.id/korupsi/103242-susno-cerita-asal-muasal-cicak-vs-buaya>

Tarlo, E. (2007). Islamic cosmopolitanism: The sartorial biographies of three Muslim Women in London. *Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture*, 11(2-3), 143-172.

Thomborrow, J. (2015). *The discourse of public participation media: from talk show to Twitter*. London-New York: Routledge. Taylor and Francis Group.

Warburton, S., & Hatzipanagos. (2013). *Digital identity and social media*. United Kingdom: Kings College London.

Zappavigna, M. (2012). *The Discourse of Twitter and social media*. London: Continuum International Pub. Group.

Zubaida, S. (2002). Middle eastern experiences of cosmopolitanism dalam Vertovec., S., & Cohen., R. (Eds.). *Conceiving Cosmopolitanism: Theory, Context, and Practice*, hal. 45 – 57. Oxford: Oxford University Press.